BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Pentingnya eksistensi pemuda dalam bangsa ini bukan tanpa alasan, karena pemuda selalu memliki semangat besar dalam membawa perubahaan. Jika para pemuda Indonesia berkualitas, secara fisik maupun psikis, maka besar harapan bahwa kehidupan bangsa saat ini dan di masa depan akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, jika mereka tidak berkualitas tentulah kehidupan bangsa saat ini dan di masa depan akan lebih buruk. Bisa dibayangkan, betapa besar masalah yang akan dihadapi bangsa Indonesia jika seperlima dari penduduknya adalah pemuda yang tidak berpendidikan, pemuda yang suka membuat keonaran dan kekerasan, pemuda pecandu Napza, pergaulan bebas dan kejahatan sosial lainnya.

Masa depan bangsa Indonesia tentunya bergantung pada semua komponen, khususnya para pemuda. Dalam Undang–Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 pasal 1 pada ayat 1 satu Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Menurut data BPS 2011 yang menunjukkan bahwa tahun 2011, jumlah pemuda sebanyak 62,92 juta jiwa yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebanyak 62,77 juta jiwa atau sekitar lebih dari seperlima (20,1%) total penduduk Indonesia yakni pada usia 16 sampai dengan usia 30 tahun. Dari sekian banyak jumlah pemuda yang ada di Indonesia, tidak menutup kemungkinan adanya ketidak-sanggupan pemuda dalam pembangunan, terlebih pada pembangunan kejahteraan hidup yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, yakni sekitar 8,12 juta jiwa (BPS: Februari 2011). Seharusnya, hal ini tidak terjadi apabila pemuda dapat memaksimalkan perannya sebagai fungsi pembangunan nasional.

Hal ini sangat penting untuk dikaji tentang solusi apa yang harus diberikan kepada kaum pemuda untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan salah satunya adalah dengan pemberdayaan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang–Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 27 bagian Pengembangan Kewirausahaan yakni:

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional; (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan; (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui: (a) pelatihan; (b) pemagangan; (c) pembimbingan; (d) pendampingan; (e) kemitraan; (f) promosi; dan/atau (g) bantuan akses permodalan

Sebagaimana perwujudan dari Peraturan Pemerintah ini, Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pemberi solusi dalam mewujudkan pemuda menjadi pemuda yang memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Bentuk program yang ditawarkan dalam Pendidikan Luar Sekolah ini salah satunya adalah pelatihan. Dimana dengan program tersebut, yakni pelatihan merupakan salah satu solusi dalam mengembangkan dan membina warga belajar dan/atau peserta pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan dan mutu sumber daya manusia. Seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah nomor 73 tahun 1991 pasal 2, ayat 2 dan ayat 3 yakni:

(a) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (b) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Pembinaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, berguna sebagai pembekalan bagi pemuda untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau membuka peluang pekerjaan/usaha dikemudian hari. Di setiap instansi pemerintahan baik itu instansi pendidikan, sosial, maupun ketenaga-kerjaan, dan juga dalam bidang pemuda dan olahraga, pelatihan sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja para tenaga kerja maupun mempersiapkan masyarakat/bangsa untuk dapat mandiri dalam berwirausaha.

Program pelatihan merupakan implementasi amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk pengembangan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelatihan bukan hanya sekedar memberikan keterampilan untuk mencari pekerjaan tetapi diharapkan mampu memandirikan peserta pelatihan dalam berwirausaha maupun mampu membuka lapangan pekerjaan.

Merujuk pada pertimbangan tentang pembentukan dan pengangkatan panitia pelatihan kewirausahaan bagi pemuda provinsi sumatera utara dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang berbunyi:

(a) Bahwa dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan dimasa depan, perlu terus ditumbuhkembangkan jiwa dan semangat, keuletan, kerja keras, kreasi dan kemandirian serta kebanggaan didalam mencapai prestasi dikalangan pemuda sehingga peran sertanya akan ssemakin nyata didalam membangun bangsa dan Negara; (b) Bahwa perlu adanya suatu pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam meningkatkan dan mendorong tumbuhnya perekonomian dan teknologi bangsa dan Negara.

Dari pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam menghadapi tantangan pembangunan dimasa depan perlu ditumbuhkembangkan satu sikap kemandirian bagi masyarakat khususnya dalam berusaha.

Sehubungan dengan itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara yang bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara dan Pariwisata kota Tanjungbalai memberikan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda pada pemuda se-Sumatera Utara termasuk pemuda yang berasal dari kota Tanjungbalai yang dirangkai dengan sosialisasi pengembangan wawasan tentang pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan di Aula-I Pemko Tanjungbalai pada bulan oktober 2011 dengan harapan kegiatan pelatihan kewirausahaan ini mampu

memandirikan para peserta pelatihan dalam berusaha dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda ini berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara yakni Tanjungbalai, Batubara, Asahan, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara. Dan pelatihan kewirausahaan ini diadakan setahun sekali oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara dengan jumlah peserta 60 orang per tahun (hasil wawancara salah seorang pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara).

Program pelatihan, dan/atau yang sejenisnya memiliki dampak positif terhadap peserta Pelatihan Kewirasuahaan Pemuda misalnya. Besar harapan tentang program yang digulirkan pemerintah maupun swasta khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi <u>Sumatera Utara</u>, jumlah angkatan kerja di Sumatera utara pada Agustus 2011 sebanyak 6,31 juta orang, terdiri dari 5,91 juta orang bekerja, dan 0,40 juta orang pengangguran. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2011 sebesar 72,09 persen. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda ini salah satunya dikarenakan oleh tingginya tingkat pengangguran masyarakat kota Tanjungbalai yakni sebesar 10,88 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2011 sebesar 6,37 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2010

sebesar 7,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dapat terserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Jika dilihat tingkat pengangguran terbuka pada masing-masing kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi di Kabupaten Dairi yakni sebesar 2,60 persen, sedangkan yang tertinggi di Kota Tanjung Balai sebesar 10,88 persen. Untuk jumlah pengangguran terbuka, Kota Tanjung Balai menjadi yang tertinggi sebesar 10,88 persen, disusul Medan dengan 9,97 persen, Sibolga dengan 9,82 persen, dan Pematang Siantar (9,50 persen) (Jurnal Medan, 08 November 2011).

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu daerah yang berada di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kota Tanjungbalai berada pada 2"58"00" Lintang Utara, 99"48"00" Bujur Timur dan 0 – 3 meter dari permukaan laut. Kota Tanjungbalai menempati area seluas 6.052,90 Ha yang terdiri dari enam kecamatan dan tiga puluh satu (31).

Berdasarkan angka proyeksi penduduk pertengahan tahun 2009 oleh BPS kota Tanjungbalai, penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 167.500 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.768 jiwa per Km2, sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 dibanding tahun 2000 adalah sebesar 2.64 % Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Teluk Nibung yaitu sebanyak 38.722 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.085 jiwa per Km2. Sedang kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 21.489 jiwa per Km2 dan Kecamatan Datuk Bandar merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 1.507 jiwa per Km2. Dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Menurut hasil penelitian dari Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (POKMASWAS SDKP) Kota Tanjungbalai tahun 2011, mengemukakan bahwa kultur budaya wirausaha masyarakat kota Tanjungbalai adalah 1) Masih bercorak manajemen keluarga yang hanya berorientasi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 2) Sikap hidup boros dan kurang produktif; 3) Kewirausahaan tidak berorientasi kepada bisnis; 4) Masih kurangnya kemandirian masyarakat nelayan; dan 5) Belum mampu mengelola teknologi produksi. Dan budaya inilah yang menjadikan generalisasi masyarakat nelayan kota tanjungbalai hidup di garis kemiskinan.

Mengatasi permasalahan ini, Pemerintah daerah kota Tanjungbalai telah melakukan upaya-upaya dalam membantu masyarkat kota Tanjungbalai khususnya nelayan, salah satunya dengan membuat program Pelatihan Kewirausahaan guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha seperti yang dilaksanakan pada hari sumpah pemuda di tahun 2011 dengan program Pelatihan Kewirausahaan untuk pemuda kota Tanjungbalai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul : Dampak Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Kemandirian Dalam Berwirausaha (Studi Pada Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Sumatera Utara).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Sekelompok pemuda yang telah mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara adalah sebagai objek penelitian pada penelitian ini. Dimana Peserta pelatihan tersebut tergolong pada pemuda yang berstatus pengangguran/ pengangguran terbuka. Pelatihan ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pemuda dengan memberikan pembekalan bagi pemuda tentang manajemen kewirausahaan. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemuda dalam rangka menumbuhkembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan, dengan harapan pelatihan ini dapat menjadikan mereka mandiri dalam berwirausaha.

Pelatihan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Pendidikan Luar Sekolah yakni tentang pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat disini adalah kebutuhan untuk menjadi individu yang mandiri dalam berwirausaha, untuk mencapai itu salah satunya adalah dengan pelatihan kewirausahaan pemuda yang ditegaskan didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 27 bagian Pengembangan Kewirausahaan dimana pelaksanaan pengembangan kewirausahaan, salah satunya dilakukan dengan menggunakan pelatihan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Permasalahannya adalah apakah benar para peserta pelatihan akan memiliki kemampuan dan kemandirian untuk berwirausaha setelah selesai mengikuti pelatihan? Untuk dapat mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan serta mencapai satu pemahaman dalam penelitian yang akan dilakukan, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian dengan tiga pertanyaan yaitu:

- Bagaimana pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara?
- 2. Bagaimana dampak pelatihan kewirausahaan pemuda terhadap kemandirian dalam berusaha pada peserta pelatihan?
- 3. Seberapa besar dampak pelatihan terhadap kemandirian berusaha pada peserta pelatihan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara.
- 2. Untuk mendeskripsikan tentang dampak pelatihan kewirausahaan pemuda terhadap kemandirian dalam berusaha pada peserta pelatihan.
- 3. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pelatihan terhadap kemandirian berusaha pada peserta pelatihan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, maka manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang ada atau tidanya dampak pelatihan kewirausahaan pemuda terhadap kemandirian dalam berusaha pada peserta pelatihan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang berapa besar dampak pelatihan terhadap kemandirian berusaha pada peserta pelatihan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkaan bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk melanjutkan penelitian pada bidang yang sama dengan lokasi yang berbeda. Dan sebagai bahan masukan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis untuk instansi masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta yang ingin melakukan program pelatihan kewirausahaan.